

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Konsep Pembangunan Masyarakat di Negara-negara Kepulauan Kecil : Madagaskar dan Maladewa

Jamaluddin Syakirin¹, Siti Rokhmawati Susanto²

¹Universitas Wahid Hasyim, ²Universitas Airlangga
jamalsyakirin@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) serves as a development benchmark in various countries to achieve balanced and sustainable global development. This presents various challenges, depending on the capabilities of each country. Small island nations, in addition to unique circumstances, also face program adaptations to achieve the SDGs, as determined by the target milestones. Community development programs in Madagascar and the Maldives demonstrate similarities and different approaches, tailored to the unique contexts of each country. This article employs a comparative case study methodology, analyzing secondary data from government reports, NGO initiatives, and academic literature on SDG-related programs in both nations. Key findings reveal that while both countries prioritize poverty alleviation through livelihood diversification (e.g., fisheries in the Maldives and agriculture in Madagascar), environmental sustainability efforts differ: the Maldives focuses on climate-resilient tourism, whereas Madagascar emphasizes reforestation and biodiversity conservation. These approaches enhance community quality of life but highlight resource constraints in small islands. The study concludes that context-specific adaptations are essential for SDG success, offering policy recommendations for other vulnerable nations.

Keywords: Community Empowerment, Islands, Madagascar, Maldives, SDGs.

ABSTRAK

Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi acuan pembangunan di berbagai negara dalam mencapai pembangunan global yang seimbang dan berkesinambungan. Hal ini menemui berbagai tantangan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Bagi negara-negara kepulauan kecil, selain dengan kondisi yang unik, juga menemui pengadaptasian program bagi tercapainya target SDGs, sebagaimana target pencapaian yang ditentukan. Melalui program pengembangan komunitas di Madagaskar dan Maladewa menunjukkan kesamaan dan pendekatan yang berbeda, disesuaikan dengan konteks unik masing-masing negara. Artikel ini menggunakan metode studi kasus komparatif, menganalisis data sekunder dari laporan pemerintah, inisiatif LSM, dan literatur akademis mengenai program-program terkait SDGs di kedua negara. Temuan utama mengungkapkan bahwa meskipun kedua negara memprioritaskan pengentasan kemiskinan melalui diversifikasi mata pencaharian (misalnya, perikanan di Maladewa dan pertanian di Madagaskar),

upaya keberlanjutan lingkungan berbeda: Maladewa berfokus pada pariwisata yang tahan iklim, sementara Madagaskar menekankan reboisasi dan konservasi keanekaragaman hayati. Pendekatan-pendekatan ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi menyoroti keterbatasan sumber daya di pulau-pulau kecil. Studi ini menyimpulkan bahwa adaptasi spesifik sangat penting bagi keberhasilan SDGs, dan menawarkan rekomendasi kebijakan bagi negara-negara rentan lainnya.

Kata kunci: Kepulauan, Madagaskar, Maladewa, Pemberdayaan Masyarakat, SDGs.

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dicetuskan pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro pada tahun 2012. SDGs menghasilkan serangkaian tujuan universal dalam menjawab tantangan terkait lingkungan, sosial, politik dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat dunia. SDGs menggantikan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah bermula pada tahun 2000 untuk mengatasi kemiskinan dan permasalahan lainnya secara global. Kandungan dalam MDGs diantaranya mencakup prioritas pembangunan dengan menetapkan tujuan-tujuan yang terukur dan disepakati secara universal untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan ekstrem, mencegah penyakit mematikan, dan memperluas akses pendidikan dasar untuk semua anak. Selama 15 tahun, MDGs mendorong kemajuan di beberapa bidang penting, antara lain: mengurangi kemiskinan, menyediakan akses pada air dan sanitasi, menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu secara signifikan. Melalui program-programnya juga memulai gerakan global untuk mengupayakan pendidikan dasar gratis dan menginspirasi negara-negara untuk berinvestasi pada generasi masa depan mereka. Dan yang paling penting, MDGs membuat langkah besar dalam memerangi HIV/AIDS dan penyakit lainnya seperti malaria dan TBC (United Nations, 2015a).

Dalam konteks pasca-2015 agenda pembangunan berkelanjutan, muncul evaluasi kritis terhadap hasil pencapaiannya, yang mengarah pada pendapat yang berbeda sehubungan dengan apakah MDGs dinyatakan berhasil atau tidak. Sebagai contoh tujuan

yang terkait dengan kemiskinan dan pemberantasan kelaparan memiliki hasil positif di beberapa daerah tertentu, seperti Asia Timur, tetapi memiliki pencapaian yang tidak signifikan di kawasan sub-Sahara Afrika, Asia Selatan dan Oseania (Yiu dan Saner, 2015). Ketika MDGs hanya difokuskan terutama pada negara-negara berkembang dan sangat tergantung pada pendanaan dari negara-negara maju, program SDGs lebih mempertimbangkan kepada aspek pembangunan manusia, hak asasi manusia dan kesetaraan di semua negara, menciptakan kemitraan dengan sektor swasta, sektor publik dan organisasi masyarakat sipil, dalam rangka untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Kumar et al., 2016).

SDGs merupakan langkah komitmen yang diupayakan untuk mengatasi beberapa tantangan yang mendesak yang dihadapi dunia saat ini. Kesemua 17 Tujuan (*Goals*) yang saling berhubungan menunjukkan keberhasilan dalam satu hal mampu memengaruhi kesuksesan bagi tujuan yang lain. Tujuan-tujuan tersebut terkait dengan ancaman perubahan iklim yang berdampak pada bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang rentan, mencapai kesetaraan gender atau kesehatan yang lebih baik untuk membantu mengentaskan kemiskinan, mendorong perdamaian dan masyarakat inklusif dimana akan mengurangi ketidaksetaraan dan membantu perekonomian. Secara ringkas hal ini merupakan kesempatan besar yang dapat dilakukan generasi sekarang untuk meningkatkan kehidupan generasi mendatang.

Tujuan utama dalam mengatasi tantangan keberlanjutan saat ini dan masa depan dalam skala global, tertuang dalam serangkaian tujuan yang diadopsi oleh PBB dalam '*Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*' (United Nations, 2015b). Proses panjang penerapan serangkaian program SDGs menawarkan peluang yang besar untuk mencapai kesempatan yang sama, mendorong pemberdayaan ekonomi, membantu negara-negara untuk mempromosikan elemen-elemen pembangunan berkelanjutan di wilayah negara masing-masing, sehingga mampu memberikan keuntungan bagi populasi mereka (W. Leal Filho et al., 2018). Untuk memastikan bahwa rencana agenda SDGs sesuai dengan tujuan, para pemangku kepentingan dapat

diarahkan melalui panduan dan dokumen perencanaan yang telah ditentukan baik pada level global, kawasan dan nasional. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang aspek-aspek tertentu dari *roadmap* yang membutuhkan perbaikan dan perubahan. Pelatihan dan penciptaan kesadaran juga diperlukan untuk memastikan bahwa para pegawai pemerintahan, swasta dan seluruh pihak terkait menjadi paham dengan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan SDGs. Pertimbangan penting lainnya dalam mendorong perubahan adalah ketersediaan sumber daya keuangan, pemantauan dan evaluasi. Persiapan-persiapan ini akan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan pencapaian, hasil, dan dampak SDGs saat ini (Akenroye et al., 2018).

Terdapat hubungan antara pembangunan berkelanjutan dan tiga pilar SDGs yang mendasarinya, yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, dimana ketiga faktor tersebut sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Negara-negara berkembang memfokuskan sumber daya dan kebijakan jangka pendek mereka pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Hal ini menjadi pertimbangan karena sumber daya yang terbatas dan SDGs sangat dimungkinkan terjadi penyesuaian-penesuaian dan inkonsistensi. Oleh karena itu, fokus kebijakan strategis pada pembangunan sosial-ekonomi di negara-negara berkembang merupakan kebijakan jangka pendek yang dimungkinkan berhasil untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, untuk konteks negara maju menunjukkan kecenderungan yang lebih besar dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada faktor lingkungan dan sosial (Bali Swain dan Wallentin, 2019).

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan studi kasus komparatif untuk mengkaji implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam konteks pembangunan masyarakat di negara-negara kepulauan kecil, dengan fokus pada Madagaskar dan Maladewa. Studi kasus ini khususnya cocok untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan konteks yang spesifik, dimana memungkinkan analisis mendalam tentang

bagaimana faktor geografis, sosial-ekonomi, dan lingkungan yang unik memengaruhi adaptasi SDGs di negara-negara tersebut (Yin, 2018). Dengan membandingkan kedua kasus tersebut, penelitian ini menyoroti persamaan dan perbedaan dalam strategi program, yang memberikan wawasan tentang pola pembangunan berkelanjutan yang lebih luas di wilayah kepulauan yang rentan.

Pengumpulan data terutama mengandalkan sumber sekunder untuk memastikan tinjauan yang komprehensif dan tidak bias. Ini termasuk laporan resmi pemerintah dari kementerian-kementerian terkait; laporan resmi PBB seperti Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), inisiatif yang didokumentasikan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lainnya; serta literatur akademis yang seperti jurnal ilmiah yang mencakup program-program terkait SDGs. Tema-tema utama yang dianalisis adalah pengentasan kemiskinan, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada intervensi tingkat komunitas seperti diversifikasi mata pencaharian, ketahanan iklim, dan upaya konservasi. Secara keseluruhan, pendekatan ini memfasilitasi pemahaman yang bernuansa tentang implementasi SDGs di negara-negara kepulauan kecil, yang menginformasikan rekomendasi kebijakan untuk konteks serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Lokalitas Kebijakan SDGs dan Pembangunan Negara Kepulauan Kecil

Peran pemerintah daerah dalam pencapaian SDGs mendapat perhatian di beberapa bagian secara internasional. Pemerintah daerah diyakini menjadi elemen yang sangat penting pada proses pencapaian SDGs karena berada di garda terdepan pemberian layanan dan berkontak langsung dengan masyarakat lokal. Akibatnya, gagasan lokalisasi harus ditanggapi dengan sangat serius oleh masyarakat internasional dan pemerintah nasional, yang harus memastikan bahwa ada dukungan yang diperlukan secara politis, finansial, manajemen dan teknis dalam konteks negara, terutama di negara-negara berkembang dimana penyediaan kebutuhan dasar masih prioritas utama dalam agenda pembangunan. Tujuan global SDGs adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal

dan hal ini menjadi kekuatan pendorong pada level daerah. Dan menjadi sangat jelas bahwa dimensi pembangunan lokal semakin terkait dengan isu-isu global dan nasional. Saat ini, keamanan manusia, perubahan iklim, kesehatan, pekerjaan dan migrasi, menjadi agenda utama nasional dan internasional. Namun, solusi bagi tantangan-tantangan ini dalam periode yang lebih lama akan memerlukan perencanaan dan pengambilan keputusan di daerah yang merupakan bagian integral dari tata kelola lokal (Reddy, 2016). Bahkan pertimbangan tersebut semakin dirasakan oleh negara dengan komposisi kepulauan, dimana memerlukan perhatian khusus terhadap kondisi masyarakat pesisirnya atau pulau-pulau yang terdapat jarak akses dengan pemerintah pusatnya, sehingga diperlukan kesinambungan kebijakan dari pusat ke daerah-daerahnya.

Kondisi negara kepulauan memiliki perhatian khusus pada pembangunan lingkungannya. Konsep pembangunan berkelanjutan adalah hubungan kompromi antara pertumbuhan dan konservasi. Secara ideologis bersifat tidak netral, karena dimaksudkan sebagai alternatif pada opsi *zerogrowth* dan oleh karena itu cenderung positif terhadap sudut pandang pertumbuhan dan modernisasi. Seluruh perdebatan seputar pembangunan berkelanjutan memperjelas bahwa pandangan antroposentris lebih kuat daripada pandangan ekosentris, namun kepedulian terhadap lingkungan setidaknya menjadi bagian dari wacana pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan sejak awal terbuka pada kritik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut dan terus berkembang dalam dekade selanjutnya (Du Pisani, 2006). SDGs mengakomodir pertimbangan-pertimbangan tersebut bagi pembangunan berkelanjutan tidak hanya pada masyarakat pesisir/kepulauan namun juga konservasi ekosistem laut.

Perhatian SDGs pada komunitas negara kepulauan terbukti dengan adanya inisiatif dan kerjasama khusus dalam kerangka *Small Island Developing States* (SIDS) atau negara berkembang pulau kecil, yang ditandai dengan lingkungan dan sosial-ekonomi yang rentan terhadap bencana dan perubahan iklim. Meskipun karakteristik atau kriteria pengelompokan geografis ini tidak pernah didefinisikan secara pasti, terdapat kesepakatan umum pada fitur berikut, antara lain: ukuran yang kecil, lokasi yang

terpencil, kerentanan terhadap guncangan eksternal, basis sumber daya yang sedikit, dan terdampak terhadap tantangan lingkungan global. Daftar SIDS terdiri dari 38 negara yang dibagi berdasarkan lokasi geografis yaitu di Karibia, Pasifik, dan Atlantik, Samudra Hindia, Mediterania, dan Laut Cina Selatan (United Nations, 2014; Gheuens et al., 2019).

Masing-masing wilayah kepulauan tersebut memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Salah satu yang populer adalah pendekatan manajemen berbasis area yang memberi peluang implementasi kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah atau tantangan yang sifatnya mendasar. Dengan demikian, jenis pendekatan ini semakin diakui sebagai mekanisme untuk mendukung konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir. Penggunaan pendekatan manajemen berbasis area spesifik di zona laut dan pesisir dipandu oleh sejumlah perjanjian global dan regional, serta komitmen untuk menggunakan pendekatan manajemen berbasis area telah berulangkali dilakukan dalam banyak proses kerjasama internasional (UN Environment, 2018).

Berbagai pendekatan dan kerjasama program diupayakan untuk meningkatkan kapasitas negara-negara kepulauan bagi tata kelola perikanan yang baik, pengelolaan zona pesisir dan pengelolaan keanekaragaman hayati khusus pesisir, laut, dan pulau. Program-program direncanakan akan membantu mengatasi kesenjangan dalam kerangka hukum, administrasi dan kelembagaan sehingga memperkuat penegakan peraturan dan kepatuhan terhadap perjanjian internasional dan regional. Program perikanan memungkinkan negara untuk memperkuat sistem pengawasan perikanan nasional dan regional serta mengelola stok perikanan. Hal ini mampu mempromosikan mekanisme regional pada kerjasama yang efektif dan juga terkait instrumen kepatuhan, mengatasi aspek hubungan interaksi antara perikanan pesisir dan perlindungan lingkungan laut, mempromosikan pendekatan partisipatif bagi pengelolaan terpadu sumber daya pesisir. Program pengelolaan keanekaragaman hayati akan memungkinkan partisipasi berbagai pihak dalam pengelolaan ekosistem kepulauan, pemulihan habitat, mengadopsi praktik manajemen yang baik untuk memastikan konservasi spesies, hutan dan juga memperkuat

kapasitas pusat keanekaragaman hayati. Program-program yang terkait menyediakan interaksi antara komunitas lokal dan lingkungannya, mengembangkan aksi berbasis komunitas untuk kehidupan yang berkelanjutan. Program pengelolaan keanekaragaman hayati dan zona pesisir memberikan peluang bagi rekonsiliasi ekologi dan ekonomi, ilmu pengetahuan dan kebijakan serta pendekatan terpadu untuk pembangunan. Penekanan diberikan pada peningkatan kesadaran bagi para pengambil keputusan tentang nilai ekonomi ekosistem dan kebutuhan untuk mendekati pembangunan secara holistik (SDGs Partnership Platforms, 2018).

Overview dan Tantangan SDGs Madagaskar

Afrika telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam MDGs, termasuk kemajuan bidang pendidikan anak di sekolah dasar, terutama untuk anak perempuan, meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen nasional, dan mengurangi kematian anak dan ibu serta proporsi orang yang terinfeksi HIV. Selain Agenda SDGs 2030, negara-negara Afrika telah berkomitmen untuk mengimplementasikan Agenda Uni Afrika 2063, yang merupakan visi dan rencana untuk membangun Afrika yang lebih makmur dalam 50 tahun. Agenda SDGs 2030 mengakui pentingnya Agenda Uni Afrika 2063 dan menganggapnya sebagai bagian integral dari SDGs (African Union Commission, 2015).

Tantangan yang dihadapi oleh kawasan Afrika membutuhkan respons inovatif yang tertanam dalam hubungan kerjasama dan berakar pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan solidaritas bersama. Hal yang menjadi tujuan bersama dapat mencapai kondisi yang lebih baik nanti pada tahun 2030 sesuai yang direncanakan. Hal ini dapat dilakukan, jika faktor-faktor kunci yang penting untuk keberhasilan implementasi SDGs telah ditetapkan dan dipertahankan, seperti dukungan entitas politik, pengembangan kelembagaan dan kapasitas manusia, proses pembangunan yang inklusif, akuntabilitas yang saling menguntungkan, dan reformasi kebijakan. Keberhasilan tujuan pembangunan berkelanjutan di Afrika akan bergantung pada cara implementasi yang kredibel, dimana

negara-negara di kawasan memiliki prioritas tantangan dan penyelesaian yang berbeda (Rotimi Jaiyesimi, 2016).

Salah satu negara kepulauan di Benua Afrika adalah Madagaskar yang berada di bagian selatan-timur. Madagaskar mengalami banyak tantangan, antara lain: stabilitas politik yang masih rapuh meskipun kemajuan dalam proses demokrasi telah dilaksanakan, tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, yang berdampak pada lebih dari 70% jumlah populasinya, ketidaksetaraan dan pengangguran yang tinggi, kerawanan pangan, kerapuhan terhadap goncangan terutama bencana alam, dan tingkat perkembangan manusia yang rendah. Negara ini tertinggal dalam usaha mengatasi kemiskinan dan kekurangan gizi. Menjadi sangat mendesak untuk dapat mengidentifikasi kekhasan Madagaskar dengan memprioritaskan aksi dalam mendukung pengurangan kemiskinan, khususnya di sektor pertanian dan lingkungan. Madagaskar menjadi tuan rumah beberapa kekayaan keanekaragaman hayati global, kemajuan yang dicapai harus terus dipertahankan untuk memastikan bahwa pengembangan sumber daya alam benar-benar menjadi dasar untuk pembangunan berkelanjutan dan diharapkan mampu bertahan lama.

Selain itu dibutuhkan mobilisasi dan upaya berkelanjutan dari komunitas internasional dan sektor swasta untuk membantu Madagaskar memenuhi tantangan saat ini dan masa depan, dan untuk mencapai kemajuan nyata menuju tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya dalam hal perdamaian dan stabilitas politik, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum, pemberantasan kemiskinan, pengurangan ketidaksetaraan, penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda dan perempuan, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, dan perlindungan terhadap lingkungan (Voluntary National Review for the High Level Political Forum – Madagascar, 2016).

Di Madagaskar, penerapan SDGs terkait erat dengan berbagai program pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh penduduk. Salah satu inisiatif yang paling menonjol adalah Sistem

Perlindungan Sosial Terpadu "Fagnavotse", yang merupakan contoh bagaimana SDGs dapat diintegrasikan ke dalam upaya pembangunan masyarakat. Program ini Diluncurkan pada bulan November 2020, program Fagnavotse, yang berarti "*to rescue*" (menyelamatkan dalam bahasa Malagasi), merupakan upaya kolaboratif yang didukung oleh UN Joint SDG Fund dan dilaksanakan oleh beberapa badan PBB, termasuk UNICEF, ILO, dan WFP. Program ini bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan sosial di Madagaskar, khususnya di daerah-daerah yang sangat terdampak oleh kemiskinan dan bencana alam, seperti kekeringan (Issa Sanogo, 2022).

Program ini terutama menargetkan populasi rentan di Distrik Amboasary di bagian selatan Madagaskar, dimana merupakan lokasi kemiskinan ekstrem. Selama dua tahun, program ini telah menjangkau lebih dari 75.000 penerima manfaat, dengan fokus utama pada perempuan dan anak-anak. Evaluasi formatif program Fagnavotse menyoroti keselarasannya dengan strategi perlindungan sosial nasional Madagaskar dan efektivitas pendekatan terpadunya. Namun, evaluasi tersebut juga mencatat tantangan dalam mencapai integrasi masyarakat secara penuh dan perlunya periode implementasi yang lebih panjang untuk membangun sistem yang berkelanjutan. Rekomendasi utama mencakup peningkatan keterlibatan masyarakat, peningkatan koordinasi dengan kementerian pemerintah, dan advokasi untuk dukungan berkelanjutan bagi inisiatif perlindungan sosial terpadu (WFP Evaluation Report, 2022).

Komitmen Madagaskar terhadap SDGs tercermin dalam kerangka kelembagaannya yang dibentuk pada tahun 2015, yang mencakup Komite Pengarah dan Pemantauan yang diketuai oleh Perdana Menteri. Kerangka ini bertujuan untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional dan meningkatkan pengembangan kapasitas di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta. Pemerintah telah melakukan berbagai konsultasi untuk meningkatkan kesadaran dan mengumpulkan masukan tentang prioritas SDGs, memastikan bahwa perspektif lokal dan regional dipertimbangkan dalam proses perencanaan (International Institute for Sustainable Development, 2016). Program-program pengembangan masyarakat di

Madagaskar menggambarkan komitmen negara tersebut terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Dengan menangani berbagai aspek kebutuhan masyarakat, seperti ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, inisiatif-inisiatif ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dan pencapaian SDGs.

Overview dan Tantangan SDGs Maladewa

Implementasi SDGs yang efektif di negara-negara Asia Selatan diyakini mampu membantu mengatasi beberapa tantangan di bidang sosial-ekonomi semisal kemiskinan. Terdapat beberapa tantangan dalam mengimplementasikan SDGs pada level negara dan regional. Di antaranya adalah pengintegrasian SDGs dengan proses perencanaan nasional menjadi hal paling utama di antara pertimbangannya. Tantangan selanjutnya adalah terkait dengan institusi, mekanisme dan sumber daya yang diperlukan untuk implementasinya. Ketersediaan data untuk pemantauan, partisipasi para pemangku kepentingan, dan penegakan akuntabilitas adalah tantangan lain yang perlu dijaga demi keberhasilan SDGs di kawasan Asia Selatan.

Wilayah Asia Selatan ini melingkupi sekitar dua perlima dari penduduk miskin dunia, sekitar setengah dari anak-anak kurang gizi di dunia dan terdapat sejumlah kesenjangan infrastruktur (United Nations, 2016; UNESCAP, 2017). Dalam konteks SDGs, kapasitas negara yang terbatas, serta komitmen fiskal yang terbatas, terbukti dapat menjadi hambatan yang secara kolektif merusak sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk mencapai target SDGs di Asia Selatan. Secara khusus, dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi makro di kawasan ini, kemajuan di masa depan akan semakin tergantung pada peningkatan pengeluaran masyarakat dan peningkatan sistem distribusi barang publik. Dimana keduanya menjadi ciri pada pola konsumsi yang berimbang, yaitu pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan serangkaian beberapa target pembangunan SDGs dan lambatnya pertumbuhan di Asia Selatan, kemajuan yang lebih signifikan secara

bersamaan akan membutuhkan peningkatan anggaran belanja publik pada sektor kesehatan, pendidikan dan meningkatkan kapasitas negara. Beberapa kombinasi intervensi kebijakan yang sesuai diyakini mampu memberikan manfaat yang signifikan di kawasan ini, terutama di negara yang sangat mengupayakan untuk mencapai tujuan 'Tanpa Kemiskinan', 'Pendidikan Berkualitas', 'Kesetaraan Gender', dan 'Pertumbuhan Inklusif' (MN Asadullah et al., 2020).

Sebagai negara berkembang pulau kecil di Asia Selatan, Maladewa menghadapi tantangan ekonomi, sosial dan lingkungan yang signifikan. Hal ini diperburuk oleh dampak dari perubahan iklim dan kerentanan terhadap guncangan internal dan eksternal. Selain itu, kondisi geografis ditambah dengan populasi yang tersebar dan biaya transaksi yang tinggi menghasilkan potensi terbatas pada skala ekonomi. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, Maladewa telah membuat kemajuan signifikan dalam bidang-bidang pemberantasan kemiskinan, mencapai pendidikan yang membaik, perawatan kesehatan dan melindungi keanekaragaman hayati darat dan laut. Namun, upaya tambahan harus dilakukan di bidang lain seperti memberdayakan perempuan, memperkuat mekanisme tata kelola dan keadilan, meminimalkan kesenjangan ekonomi dan konsumsi dan produksi berkelanjutan untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan (Voluntary National Review for the High Level Political Forum – Maldives, 2017).

Pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat telah mengurangi kemiskinan secara signifikan dan juga turut meningkatkan kesejahteraan rakyat Maladewa. Namun, pertumbuhan yang terutamanya didorong oleh sektor pariwisata telah mencapai pola rutinnya dan sangat rentan terhadap guncangan dari eksternal, selain itu juga tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi populasi muda yang terus bertumbuh. Ke depan, Maladewa memerlukan strategi pertumbuhan yang lebih luas, berkelanjutan, dan inklusif mengingat sumber daya yang tersedia dan populasi yang kecil. Infrastruktur transportasi sangat penting, dan peningkatan aspek transportasi akan membantu mengatasi masalah konektivitas negara dan mengurangi biaya produksi sektor

bisnis. Tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil dapat meningkatkan produktivitas dan membantu menemukan ceruk pasar ekonomi tambahan bagi negara ini. Seperti halnya semua negara, pemerintah harus tetap sadar akan pentingnya menjaga stabilitas fiskal dan sistem intermediasi keuangan yang berfungsi secara memadai untuk memungkinkan dan mendukung investasi publik dan swasta yang diperlukan dalam proses pertumbuhan (Asian Development Bank, 2015).

Pariwisata dimana merupakan pilar utama ekonomi Maladewa tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan lingkungan yang signifikan, termasuk pengelolaan limbah dan konsumsi sumber daya. SDG 12 bertujuan untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, yang sangat penting bagi Maladewa karena ketergantungannya pada ekosistem yang rapuh. Pada kondisi yang lain, Maladewa adalah rumah bagi beberapa terumbu karang dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, yang terancam oleh perubahan iklim, pengasaman laut, dan penangkapan ikan berlebihan. SDG 14 berfokus pada pelestarian dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, menjadikan pelestarian laut sebagai prioritas utama bagi negara tersebut. Terkait dengan kondisi lingkungannya, Maladewa adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim di dunia karena letaknya yang rendah dan paparan terhadap naiknya permukaan air laut serta peristiwa cuaca ekstrem. SDG 13 berfokus pada tindakan iklim yang mendesak, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pembangunan masyarakat pesisir di Maladewa. Selanjutnya bidang perikanan merupakan bagian penting dari ekonomi dan sistem pangan Maladewa, namun perikanan semakin terancam oleh penangkapan ikan yang berlebihan dan kerusakan lingkungan. Untuk mencapai SDG 2 (Tanpa Kelaparan) diperlukan jaminan ketahanan pangan melalui pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Masing-masing tantangan tersebut terkait tujuan utama SDG yang relevan dengan Maladewa, menggabungkan keberlanjutan lingkungan dengan pembangunan masyarakat. Penerapan SDGs di Maladewa terkait erat dengan berbagai program pengembangan masyarakat yang ditujukan untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh negara kepulauan tersebut.

Maladewa telah membuat langkah signifikan dalam menyelaraskan strategi pembangunan nasionalnya dengan SDGs. Salah satu program pembangunan masyarakat utama yang berkontribusi pada implementasi SDGs di negara tersebut adalah Program Pembangunan Masyarakat Terpadu (Integrated Community Development Program/ICDP). ICDP merupakan inisiatif komprehensif yang diluncurkan oleh Pemerintah Maladewa pada tahun 2016 untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat lokal di seluruh negeri (Maldives Ministry of Environment and Energy, 2017). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat pulau dengan fokus pada bidang-bidang utama seperti: Mata Pencaharian dan Pembangunan Ekonomi; Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan; dan Konservasi Lingkungan dan Ketahanan Bencana. Penyelarasan ICDP dengan SDG terbukti dalam pendekatan komprehensifnya untuk menanggulangi kemiskinan (SDG 1), mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (SDG 8), memastikan akses ke pendidikan berkualitas (SDG 4), dan mendorong kesetaraan gender (SDG 5), di antara tujuan-tujuan lainnya.

KESIMPULAN

SDGs sebagai kelanjutan platform pembangunan yang universal setelah penerapan MDGs mengalami penyempurnaan dan penyesuaian serta mengidentifikasi berbagai kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Tidak terkecuali negara berkembang pulau kecil yang mendapat porsi khusus bagi terjalinya pemerataan dan keadilan pembangunan. Tidak dipungkiri masyarakat pulau kecil memiliki kerentanan yang tinggi jika dihadapkan pada efek pemanasan global dan berbagai tantangan yang dihadapinya, baik akses kemudahaan ekonomi maupun terkait lingkungan. Sehingga pengidentifikasian masalah yang dihadapi perlu benar-benar dirumuskan dalam kebijakan yang khusus pula oleh pemerintahan lokalnya, dengan mengikuti panduan dan roadmap pembangunan nasionalnya agar menjadi prioritas yang efektif. PBB bersama badan-badan pendukungnya terus melakukan pengawasan dan

evaluasi berbagai inisiatif dan program secara berkala bagi memastikan progres pencapaian upaya-upaya yang dilakukan dalam kerangka SDGs.

Negara-negara berkembang secara umum memiliki tantangan yang hampir sama, baik terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, lemahnya peran institusi, kurangnya kapabilitas dan ketersediaan sumber daya pendukung dan juga masih rendahnya upaya konservasi lingkungan. Untuk kondisi khusus pada negara kepulauan memiliki keunikan tersendiri, baik potensi maupun tantangan yang dihadapi. Bahkan masing-masing wilayah juga memiliki karakter kepulauan yang berbeda-beda. Madagaskar sebagai negara kepulauan di bagian terpisah dari Benua Afrika, memiliki potensi yang besar dengan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya. Dengan kondisi demikian dapat menjadi nilai tukar pada penguatan pemodal SDGs pada sektor yang lain. Penerapan SDGs di Madagaskar, khususnya melalui program pengembangan masyarakat seperti Fagnavotse, menunjukkan pendekatan komprehensif untuk mengatasi kerentanan sosial dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Dukungan dan adaptasi berkelanjutan terhadap program-program ini sangat penting untuk mencapai dampak jangka panjang dan ketahanan dalam menghadapi tantangan yang sedang berlangsung. Maladewa yang menjadi bagian dari wilayah Asia Selatan, dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki mengedepankan aspek nilai pariwisata sebagai penopang pembangunan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan berbagai inisiatif pembangunan masyarakat, Maladewa telah menunjukkan pendekatan holistik untuk memajukan SDG di tingkat lokal. ICDP menjadi contoh utama tentang bagaimana intervensi yang terarah dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh negeri.

Perbandingan dari karakter dan tantangan masing-masing negara memberikan persepektif yang unik dalam mengimplementasikan SDGs beserta konsep pemberdayaan masyarakatnya. Pada aspek keterlibatan masyarakat, kedua negara telah memprioritaskan keterlibatan masyarakat, tetapi program Madagaskar menghadapi tantangan dalam hal integrasi, sementara Maladewa menekankan kolaborasi dan

kemitraan. Pada aspek pembangunan ekonomi, fokus Madagaskar adalah pada perlindungan sosial dan pengelolaan sumber daya, sedangkan Maladewa menekankan pariwisata berkelanjutan dan ketahanan bencana. Aspek kepedulian lingkungan, kedua negara menggabungkan keberlanjutan lingkungan, tetapi Maladewa memiliki fokus yang lebih kuat pada ketahanan iklim karena kerentanan geografisnya. Sedangkan integrasi program, program-program Madagaskar seringkali membutuhkan lebih banyak waktu untuk integrasi komunitas, sementara Maladewa telah berhasil menyatukan berbagai inisiatif di bawah kerangka ICDP.

Secara keseluruhan, baik Madagaskar maupun Maladewa telah berusaha untuk mengimplementasikan SDGs melalui program pengembangan masyarakat, dengan pendekatan yang mencerminkan konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan masing-masing. Dengan memahami kekuatan dan tantangan di setiap negara, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- African Union Commission (2015). Agenda 2063: The Africa We Want. Addis Ababa: African Union. <http://www.agenda2063.au.int/en/home>.
- Akenroye, T. O., Nygård, H. M., & Eyo, A. (2018). Towards implementation of sustainable development goals (SDG) in developing nations: A useful funding framework. International Area Studies Review, 21(1), 3–8. <https://doi.org/10.1177/2233865917743357>
- Asadullah, M.N., Savoia, A. & Sen, K. Will South Asia Achieve the Sustainable Development Goals by 2030? Learning from the MDGs Experience. Soc Indic Res (2020). <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02423-7>.
- Asian Development Bank (2015). Maldives: Overcoming the Challenges of a Small Island State. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank.
- Bali Swain, Ranjula & Wallentin, Fan. (2019). Achieving Sustainable Development Goals: Predicaments and Strategies. The International Journal of Sustainable Development and World Ecology. 27. 10.1080/13504509.2019.1692316.
- Du Pisani, Jacobus A. (2006) Sustainable development – historical roots of the concept, Environmental Sciences, 3:2, 83-96, DOI: 10.1080/15693430600688831.
- Gheuens, J.; Nagabhatla, N.; Perera, E.D.P. Disaster-Risk, Water Security Challenges and Strategies in Small Island Developing States (SIDS). Water 2019, 11, 637.

- Hanisch, Susan & Eirdosh, Dustin. (2015). Madagascar 2030. The Role of Universities in Sustainable Development. A Report from the Inaugural Conference 18 September 2015, Toliara, Madagascar. 10.13140/RG.2.1.1766.9846.
- International Institute for Sustainable Development (2016). Madagascar, Togo Report on SDG Implementation. Diakses pada, <https://sdg.iisd.org/news/madagascar-togo-report-on-sdg-implementation/>
- Jaiyesimi, Rotimi (2016). The Challenge of Implementing the Sustainable Development Goals in Africa: The Way Forward, African Journal of Reproductive Health September 2016 (Special Edition on SDGs); 20(3).
- Kumar S, Kumar N, Vivekadhish S. (2016). Millennium development goals (MDGS) to sustainable development goals (SDGS): addressing unfinished agenda and strengthening sustainable development and partnership. Indian J Community Med (Editorial Commentary). 41:1-4.
- Maldives Ministry of Environment and Energy. (2017). Integrated Community Development Programme (ICDP). Diakses pada, <https://www.environment.gov.mv/v2/en/projects/integrated-community-development-programme-icdp>.
- Reddy, P.S. (2016). Localising the sustainable development goals (SDGs): the role of local government in context. African Journal of Public Affairs, 9(2).
- Sanogo, Issa. (2022). 'Fagnavotse' Integrated Social Protection System in Madagascar | Joint SDG Fund. Diakses pada, <https://jointsdfund.org/article/fagnavotse-integrated-social-protection-system-madagascar>.
- SDGs Partnership Platforms (2018). Sustainable Management of the Coastal and Marine Resources. Diakses pada, <https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=7672>.
- UN Environment (2018). The Contributions of Marine and Coastal Area-Based Management Approaches to Sustainable Development Goals and Targets. UN Regional Seas Reports and Studies No. 205.
- UNESCAP. (2017). Achieving the sustainable development goals in South Asia: Key policy priorities and implementation challenges. Diakses pada, https://www.unescap.org/sites/default/files/publications/Report_Achieving_the_Sustainable_Development_Goals_in_South_Asia_12052017.pdf.
- United Nations. (2014). Trends In Sustainable Development, Small Island Developing States (SIDS). New York: UN Department of Economic and Social Affairs.
- United Nations. (2015a). The Millennium Development Goals report 2015. New York: United Nations.
- United Nations. (2015b). Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. Tersedia pada, http://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/3/2015/08/120815_outcome-document-of-Summit-for-adoption-of-the-post-2015-development-agenda.pdf
- United Nations. (2016). The Sustainable Development Goals report 2016. New York: United Nations.
- Voluntary National Review for the High Level Political Forum – Madagascar (2016). Rapport National De Revue Du Processus De L'agenda 2030 Pour Le Developpement Durable.

- Voluntary National Review for the High Level Political Forum – Maldives (2017). Sustainable Development Goals Division, Ministry of Environment and Energy, Republic of Maldives.
- W. Leal Filho, S. K. Tripathi, J. B. S. O. D. Andrade Guerra, R. Giné-Garriga, V. Orlovic Lovren & J. Willats (2019) Using the sustainable development goals towards a better understanding of sustainability challenges, International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 26:2, 179-190, DOI: 10.1080/13504509.2018.1505674.
- WFP Evaluation Report. (2022). Madagascar, Formative Evaluation of Integrated Social Protection Programme in the South of Madagascar (Joint SDG Fund) | World Food Programme. Diakses pada, <https://www.wfp.org/publications/madagascar-formative-evaluation-integrated-social-protection-programme-south>.
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). Sage Publications.
- Yiu LS, Saner R. (2015). Sustainable development goals and millennium development goals: an analysis of the shaping and negotiation process. Asia Pac J Public Adm. 36(2): 89–107.